

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, reformasi aspek keuangan negara baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun berlaku. Selanjutnya reformasi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah salah satunya ditetapkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pada pasal 31, disebutkan bahwa Gubernur/ Bupati/ Wali Kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). UU no. 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan

sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan pemerintah yang berkualitas (Roviyantie, 2012).

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, seiring mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah (Windiastuti, 2013).

Tingkat pendidikan sering kali menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang memadai seorang lebih mudah melaksanakan tugasnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dengan dilatarbelakangi pendidikan akuntansi atau keuangan.

Dinas Kesehatan Kota Gorontalo merupakan dinas pemerintah yang bergerak dalam bidang jasa dan pelayanan kesehatan masyarakat, selain itu Dinas Kesehatan Kota Gorontalo juga mempunyai peran

sebagai pengawas kegiatan di setiap puskesmas yang ada di Kota Gorontalo, dimana terdapat sepuluh puskesmas yang ada di Kota Gorontalo, dan bertugas menyampaikan pelaporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban kinerja keuangannya kepada publik. Adapun kompetensi pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan di luar Ekonomi khususnya Akuntansi.

Selain itu, hal yang mendasar untuk dapat melakukan pengelolaan data keuangan secara efektif dan efisien yakni dibutuhkan suatu sistem informasi terintegrasi yang dapat diandalkan, cepat dan akurat sehingga suatu sistem dapat diintegrasikan secara menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang handal dan relevan (Astuti, 2013).

Untuk mewujudkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat, dan akurat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan setiap saat, yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik ditingkat pelaporan (SKPKD) ataupun ditingkat akuntansi (SKPD). Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran, serta pelaksanaan dan penata-usahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD (www.BPKP.go.id).

Dinas Kesehatan Kota Gorontalo telah menerapkan SIMDA sebagai sistem informasi pengelola keuangan dan sistem informasi pelaporan keuangan sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang. Pengimplementasian Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo memiliki kendala dimana masih terbatasnya sumber daya manusia yang paham dalam pengimplementasian Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Data kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Gorontalo yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana disajikan pada tabel 1 dan 2.

a. Latar belakang pendidikan

Tabel 1
Data Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan terakhir	Jumlah	Presentase
Keuangan		
a. Akuntansi	1	2,5%
b. Manajemen Keuangan	1	2,5%
Non- Keuangan	37	95%
Total	39	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Gorontalo

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai yang berlatar belakang pendidikan keuangan khususnya akuntansi hanya sebanyak 1 orang atau sebesar 2,5% dan manajemen keuangan hanya 1 orang atau sebesar 2,5% dari total pegawai terlibat dalam penyusunan

laporan keuangan. Pegawai yang berlatar belakang non-keuangan lebih mendominasi sebanyak 37 orang atau sebesar 95%.

b. Tingkat pendidikan terakhir

Tabel 2
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)		
	Keuangan		Non-Keuangan
	Akuntansi	Manajemen Keuangan	
SD-SMA	1	-	3
D1	-	-	9
D3	-	-	1
S1	-	1	23
S2	-	-	1
S3	-	-	-
TOTAL	39		

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Gorontalo

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan SD-SMA bidang keuangan khususnya akuntansi terdapat 1 orang pegawai sedangkan tingkat pendidikan S1 bidang keuangan hanya 1 orang dari total 39 orang pegawai di bidang keuangan. Meskipun tingkat pendidikan S2 terdapat 1 orang akan tetapi bukan berlatar belakang pendidikan keuangan.

Dari tabel di atas terdapat kurang lebih 5% pegawai bidang keuangan yang berlatar belakang pendidikan keuangan akan tetapi masih kurang kompeten dalam pengimplemantasian SIMDA dan kurang memiliki keahlian dalam mengoperasikan komputer. Secara teknis di lapangan mereka tidak mengetahui keseluruhan langkah-langkah penggunaan

aplikasi SIMDA, secara umum begitupun dengan pemahaman terhadap menu-menu program yang ada di dalam aplikasi SIMDA (Berdasarkan wawancara dengan pegawai bagian keuangan di Dinas Kesehatan Kota Gorontalo).

Pegawai yang sering mengikuti pelatihan hanya pegawai yang memiliki jabatan tinggi seperti Kasubag Keuangan dan untuk staf masih kurang mengikuti pelatihan, seperti sebagian pegawai bagian keuangan yang ada di setiap puskesmas karena pelatihan biasanya dilakukan untuk seluruh SKPD tidak khusus untuk Dinas Kesehatan sehingga hanya beberapa pegawai terkait saja yang dapat mengikuti pelatihan.

Kemudian berdasarkan wawancara juga ditemukan bahwa kelemahan dalam pengelolaan data keuangan antara lain sering terjadinya kesulitan dalam pertukaran *file* ataupun *import-eksport* data, sering tidak keluar/tampil laporan atau *report* yang diinginkan *user*, tanggal dan kode rekening dalam laporan sering tidak keluar/tampil dalam laporan tersebut, sering terjadi perbedaan jumlah hasil rekapan antar laporan yang tentu saja dapat berakibat pada keterandalan laporan. Masalah lainnya apabila terjadi kesalahan penginputan dalam laporan, *user* akan mengalami kesulitan melakukan perbaikan (*rollback*) karena disebabkan semua laporan berada dalam satu *database*, jadi apabila satu laporan di *rollback* otomatis akan mempengaruhi laporan yang lainnya.

Selain itu masalah perangkat juga sering menghantui, penerapan SIMDA yang sering terjadi antara lain *software* SIMDA harus berjalan

pada *platform Windows 7*, hal ini disebabkan SIMDA akan berjalan tidak stabil apabila hanya diterapkan pada *Windows XP*, selain itu masalah dari segi perangkat adalah jaringan yang dimana sering terputusnya koneksi jaringan ketika user akan melakukan koneksi ke *server SIMDA* Sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan keuangan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Roviyantie (2012) dengan judul penelitian “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (survei pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya)“. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan, pada penelitian Roviyantie (2012) menggunakan teori kompetensi berdasarkan Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2007, sedangkan penelitian ini menggunakan teori kompetensi Spencer Dan mengubah variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang merujuk pada penelitian Mohune (2013) dengan judul penelitian Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) terhadap kualitas laporan Keuangan Daerah (Survei pada Dinas DPPKAD Kabupaten Gorontalo) serta penelitian yang dilakukan oleh Harmadani (2013), dimana dalam penelitian Harmadani (2011) lebih spesifik pada penerapan SIMDA Keuangan, sedangkan pada penelitian ini mengukur penerapan SIMDA keuangan, BMD, Gaji, dan pendapatan serta lokasi penelitian yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo** “

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten yang berlatar belakang pendidikan keuangan khususnya Akuntansi dimana hanya terdapat 5% pegawai bidang keuangan yang berlatar belakang pendidikan keuangan dan kurangnya pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang paham dalam pengimplementasian Sistem Informasi Manajemen Daerah, masalah dari segi perangkat serta jaringan dimana sering terputusnya koneksi jaringan ketika user akan melakukan koneksi ke *server* SIMDA.
3. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang dapat berdampak buruk bagi kinerja pemerintah di masa mendatang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo?
2. Apakah penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia dan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Kesehatan Kota.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yang terdiri dari dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan adalah sebagai berikut: Bagi mahasiswa jurusan Akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembandingan untuk menambah ilmu pengetahuan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, sebagai referensi dan pertimbangan dalam perekrutan pegawai dan pengawasan jaringan SIMDA serta pengelolaan keuangan daerah sehingga mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah sebagai penyelenggara kegiatan publik untuk mencapai tata pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel.
2. Sebagai pencerah bagi masyarakat, bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengkritisi dan meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah sebab yang dikelola adalah dana masyarakat dan untuk masyarakat pula.